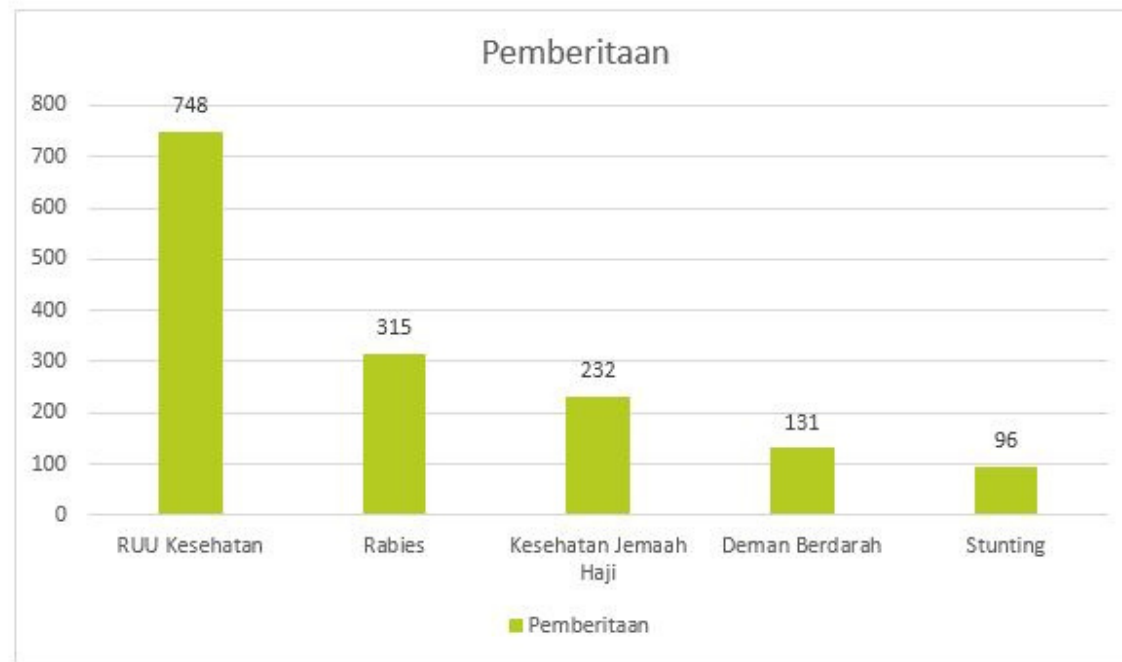


TREN PEMBERITAAN 31 MEI - 6 JUNI 2023



RUU Kesehatan

Ribuan orang dari lima organisasi profesi kesehatan kembali berunjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/6/2023). Mereka menuntut pembahasan RUU itu transparan dan memperhatikan aspirasi organisasi profesi. Unjuk rasa yang kedua kali melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Ketua umum IDI Adhib Khumaidi mengatakan, tuntutan mereka masih sama dengan jilid pertama, untuk menghentikan pembahasan yang berlangsung di DPR. Substansi yang dibahas dalam RUU Kesehatan dinilai belum mengakomodasi soal kesehatan keseluruhan di Indonesia. Selain itu, pembahasan RUU tersebut dinilai terburu-buru. Banyak masukan publik, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, tak diperhatikan dan tak masuk pembahasan RUU Kesehatan.

Rabies

Saat ini ada dua kabupaten di Indonesia yang berstatus kejadian luar biasa (KLB) rabies yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran menyebutkan jika sebelumnya TTS yang berada di Pulau Timor

tidak pernah ada kasus rabies. Lebih lanjut dr. Imran pun menjelaskan perihal ketersediaan vaksin rabies. Pada 2023, Kemenkes sudah mengadakan vaksinasi untuk rabies sebanyak 241.700 vial dan 1650 vial untuk serum antirabies (SAR). Saat ini, pihaknya juga sudah mendistribusikan vaksin ke provinsi hampir 227 ribu vial. Sedangkan untuk SAR, sudah ada 1550 vial. Ia juga menduga kemunculan penyakit rabies tersebut berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pada 2020, kasus orang yang digigit ada 82.634, yang diberi vaksin anti rabies hampir 57 ribu dan sebanyak 40 orang meninggal. Sedangkan tahun 2021 ada 57.257 kasus dan 62 orang yang meninggal. Puncak kasus terjadi pada 2022 yaitu 104.229 kasus gigitan dengan 102 kasus kematian. Lebih lanjut, pada 2023 sampai saat ini sudah ada lebih dari 31 ribu gigitan rabies yang dilaporkan dengan 11 kematian.

Kesehatan Jemaah Haji

Kemenkes melaporkan sebanyak 26.192 peserta calon haji asal Indonesia menjalani perawatan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan Arab Saudi. Mereka dirawat jalan lantaran mengalami gangguan kesehatan. Secara rinci, peserta calon haji yang menjalani rawat jalan di Madinah tercatat sebanyak 24.467 orang. Sementara sisanya yaitu 1.223 orang dirawat di Mekkah dan 502 orang di bandara. Adapun, yang sampai dirujuk ke rumah sakit mencapai 165 peserta calon haji, terdiri atas 172 orang di Madinah, 13 orang di Mekkah, dan 11 orang di bandara. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Liliek Marhaendro Susilo mengatakan jumlah peserta calon haji yang berkategori risiko tinggi sebanyak 75,37%. Mereka rata-rata berusia di atas 60 tahun dengan riwayat komorbid. Kemenkes juga melaporkan jumlah pasien rawat inap di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah berjumlah 197 orang dan KKHI di Mekkah sebanyak 30 orang. Kemenkes juga sedianya telah mengirim obat-obatan ke Arab Saudi seberat 107,8 ton dan telah didistribusikan ke daerah KKHI Madinah dan Makkah pada 21 Mei 2023.

Demam Berdarah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atas peluncuran inovasi Implementasi Wolbachia Ing Kota Semarang (Wingko Semarang). Ia mengatakan nantinya akan ada lima kota yang dibiayai Kemenkes

dan menjadi *pilot project* atau proyek percontohan penyebaran nyamuk berbakteri wolbachia. Lima kota yang dibiayai Kemenkes itu adalah Kota Semarang, Jakarta Barat, Bontang, Kupang, dan Bandung. Budi mengatakan Kemenkes akan melakukan dua strategi dalam menangani penyebaran DBD di berbagai kota di Indonesia, yakni bioteknologi dan vaksinasi. Ia menyebut bioteknologi akan membuat nyamuk demam berdarah mandul, sedangkan vaksinasi akan membuat manusia menjadi kebal dari DBD.

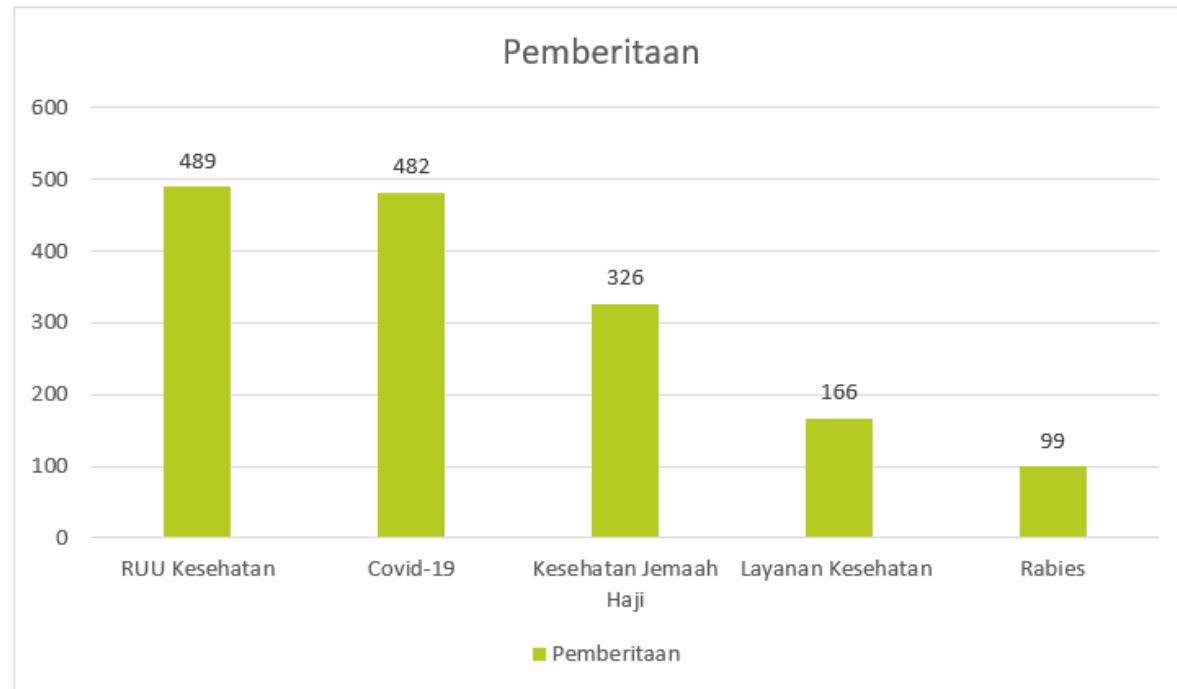
Stunting

Dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan program percepatan penurunan stunting melalui sinergitas dan kolaborasi tim percepatan penurunan stunting, Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman mengatakan Stunting bukan hanya karena gizi buruk, ukuran badan yang pendek. Namun, ada faktor-faktor intervensi lain yang harus serius dilakukan mulai dari makanan, lingkungan, kesehatan dan sebagainya sejak dini. Meurah Budiman menjelaskan, usia pernikahan juga sangat besar pengaruhnya pada stunting. Intervensi sejak sebelum pernikahan menjadi sangat penting, meskipun menunda pernikahan dini sangatlah susah. Peran Datok Penghulu sangat diperlukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakatnya.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu RUU Kesehatan yang menekankan pada lima organisasi profesi yang menuntut pembahasan RUU transparan dan memperhatikan aspirasi organisasi profesi. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Penyediaan, Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Pusjak SKK dan SDK.

TREN PEMBERITAAN 7 - 13 JUNI 2023



RUU Kesehatan

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menyoroti penetapan besaran anggaran kesehatan 10 persen di RUU Kesehatan masih sangat dibutuhkan. Hal ini merespons soal ramainya penolakan penghapusan anggaran kesehatan 10 persen di RUU dengan metode omnibus law tersebut. *Founder dan Chief Executive Officer* CISDI Diah Satyani Saminarsih menjelaskan, *mandatory spending* anggaran kesehatan sebesar 10 persen sebenarnya dapat digunakan untuk membantu pembiayaan APBD sehingga memperluas ruang gerak fiskal upaya kesehatan di daerah. *Mandatory spending* anggaran kesehatan itu sebagai penyangga komitmen daerah. Sementara pemerintah pusat berupaya meningkatkan penggunaan anggaran tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI membenarkan, besaran anggaran kesehatan pada DIM RUU Kesehatan terbaru memang dihapuskan. Alasannya, anggaran kesehatan itu mengikuti sesuai perencanaan kegiatan. Sehingga tidak sekadar terbatas pada persentase besaran tertentu.

Covid-19

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) menerbitkan surat edaran (SE) terbaru nomor 1 tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada

Masa Transisi Endemi Covid-19. Di dalamnya, pelaku perjalanan dalam dan luar negeri diperbolehkan tidak memakai masker asalkan dalam kondisi sehat. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan *booster* kedua atau dosis keempat, terutama bagi yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19. Cuci tangan dan pemakaian *hand sanitizer* juga tetap dianjurkan secara berkala terutama apabila telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Meski dilakukan sejumlah pelanggaran, Satgas Covid-19 menyatakan pembatasan akan kembali diberlakukan apabila kasus Covid-19 mengalami peningkatan signifikan.

Kesehatan Jemaah Haji

Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus diupayakan agar lebih efektif dan maksimal setiap tahunnya. Pada tahun ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberlakukan sistem informasi serta distribusi obat dan perbekalan kesehatan (Perbekkes) guna mempermudah jemaah mendapat obat yang diperlukan. Penyelenggaraan haji sebelumnya, pemenuhan kebutuhan obat dan Perbekkes di sektor dan kloter menggunakan sistem amprah. Artinya, tenaga kesehatan haji (TKH) mengambil obat dan Perbekkes di depo obat yang berada di KKHI. Sistem tersebut dirasa kurang efisien karena membuat TKH meninggalkan jemaah haji dalam waktu lama. Selain itu, transportasi menuju depo obat pun banyak dikeluhkan oleh TKH. Sekarang, dari KKHI yang berperan sebagai depo, obat dan perbekkes, dari masing-masing daker didorong ke sektor dan kemudian ke kloter, sehingga TKH bisa mengambil obat yang diperlukan lebih dekat. Diharapkan, dengan sistem ini TKH bisa lebih fokus memberikan pelayanan pada jemaah haji di kloternya. Untuk memonitor persediaan obat dan perbekkes di kloter, apotek, serta depo obat di setiap daker, tahun ini diterapkan sistem informasi yang dinamai SOBATHAJI.

Layanan Kesehatan

Menurut Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi Penyakit paru terutama tuberculosis paru (TB Paru) menjadi perhatian khusus

di Sumut. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2021, Sumut menempati posisi ke-6 Provinsi se-Indonesia untuk kasus TB paru (22.169 kasus). Sedangkan di tahun 2022, TB Indonesia capai rekor tertinggi, 969 ribu dengan tingkat kematian 93 ribu per tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, Wamenkes menyambut baik upaya Pemprov Sumut membangun RS Khusus Paru. Apalagi sekarang ini menjadi perhatian khusus nasional, bahkan internasional.

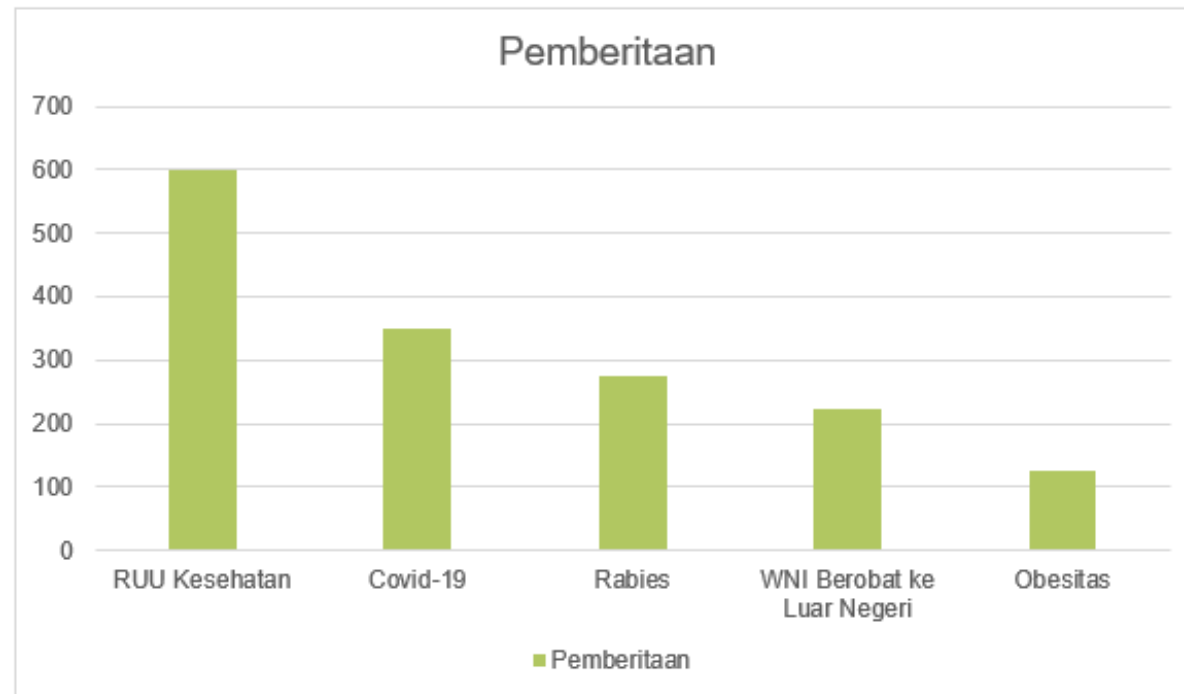
Rabies

Sebanyak 50 anjing di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (10/6) disuntik vaksin rabies sebagai upaya untuk mencegah masuknya wabah rabies ke daerah itu. Pasalnya, wabah rabies di Timo Tengah Selatan yang hanya berjarak 110 kilometer dari Kota Kupang, telah mencapai 247 kasus. Vaksinasi anjing digelar di halaman Kantor Gubernur NTT yang dilakukan oleh Flobamora Canine Community (FCC), salah satu komunitas pecinta anjing di Kota Kupang. Kegiatan ini menggandeng Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Pertanian Kota Kupang. Pengadaan vaksin dilakukan oleh anggota komunitas hanya 500 dosis. Namun, ke depan, pengadaan vaksin akan ditambah. Kota Kupang sebagai pintu masuk menuju Timor Tengah Selatan merupakan wilayah yang terancam rabies. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan vaksinasi pada anjing dan kucing sebagai hewan penular rabies.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu RUU Kesehatan. Salah satunya menyoroti penetapan besaran anggaran kesehatan 10 persen di RUU Kesehatan masih sangat dibutuhkan. Hal ini merespons soal ramainya penolakan penghapusan anggaran kesehatan 10 persen di RUU. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah, Pusjak PDK.

TREN PEMBERITAAN 14 - 20 JUNI 2023



RUU Kesehatan

Pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Meski begitu, penolakan terus disuarakan oleh sejumlah pihak. Ekspresi penolakan ditunjukkan lewat berbagai cara hingga akhirnya uji materi akan dilakukan apabila regulasi tersebut tetap disahkan. Hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah terkait dengan RUU Kesehatan di Jakarta, Senin (19/6/2023), menyepakati naskah RUU tersebut akan ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. Pada rapat tersebut, tujuh fraksi di Komisi IX DPR setuju pembahasan RUU Kesehatan, sementara dua fraksi menolak pembahasan tersebut. Dua fraksi yang menolak ialah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Emanuel Melkiades Laka Lena, yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan, menilai, proses pembahasan RUU ini telah dilakukan secara intensif, hati-hati, dan komprehensif. Ia menuturkan, RUU Kesehatan dibahas dengan landasan urgensi penguatan sistem kesehatan yang rencananya akan diwujudkan melalui transformasi kesehatan. Upaya transformasi perlu didukung landasan hukum yang kuat dan harmoni agar regulasi di bidang kesehatan tidak tumpang tindih.

Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan berakhirnya pandemi pada akhir Juni ini. Saat ini Kementerian Kesehatan dan semua pihak terkait mempersiapkan pelaksanaan masa transisi dari pandemi menuju endemi. Pemerintah juga terus mendetailkan sejumlah hal terkait dengan transisi pandemi ke endemi. Misalnya, menyangkut kasus harian, kasus aktif, tingkat vaksinasi, dan sebagainya. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, virus penyebab Covid-19 tidak akan hilang. Karena itu, masyarakat harus belajar hidup dengan virus tersebut. Budi memaparkan, sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan masyarakat dalam masa transisi dari pandemi ke endemi ini. Pertama, masyarakat harus mengetahui penyakitnya serta cara menghindarinya. Kedua, masyarakat harus mengetahui surveilans atau cara mendeteksi penyakitnya. Ketiga, masyarakat diharapkan mengetahui obat atau antivirus dari penyakitnya. Dan keempat, masyarakat juga perlu mengetahui vaksin sebagai upaya memberikan perlindungan pertama bagi mereka yang telah masuk kategori boleh divaksin.

Rabies

Anjing, kucing, atau kera yang terjangkit virus rabies menggigit manusia, air liur yang mengandung virus akan masuk ke tubuh manusia melalui gigitan. Sementara, penularan non-gigitan dapat melalui jilatan pada kulit yang terbuka. Penyakit rabies memiliki masa inkubasi atau selang waktu yang berlangsung antara paparan terhadap patogen hingga gejala-gejala pertama kali muncul sekitar dua minggu hingga dua tahun. Sementara itu, WHO mencatat perjalanan penyakit rabies pada tubuh manusia membutuhkan waktu rata-rata 90 hari. Ahli kesehatan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pun meminta masyarakat untuk selalu mewaspada penularan penyakit rabies mengacu pada masa inkubasi virus itu pada tubuh manusia. Virus rabies yang masuk ke tubuh manusia akan mulai melakukan replikasi di jaringan otot sekitar lokasi gigitan, naik ke otak, berkembang biak, lalu menjalar seluruh organ tubuh.

WNI Berobat ke Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyentil dampak dari banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri. Fenomena ini berujung pada devisa Indonesia yang hilang sampai USD11,5 miliar atau setara Rp170 triliun per tahun. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat meresmikan Rumah Sakit Tzu Chi pada Rabu (14/6/2023) di Pantai Indah Kapuk, Jakarta

Utara. Kehadiran Rumah Sakit Tzu Chi, menurut Jokowi dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Akses fasilitas kesehatan dengan sumber daya manusia (SDM), yakni dokter dan tenaga kesehatan bisa diperoleh masyarakat. Ia pun mengingatkan kepada masyarakat bila membutuhkan pelayanan kesehatan, tak perlu jauh-jauh ke negara tetangga. Tzu Chi Hospital sudah menyiapkan peralatan yang bisa bersaing. Tzu Chi Hospital adalah rumah sakit berskala besar pertama yang dibangun Tzu Chi di luar Taiwan. Jokowi pun menghargai kehadiran rumah sakit ini. Ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang canggih di rumah sakit (RS) untuk mendeteksi penyakit diharapkan bisa mengurangi Warga Negara Indonesia (WNI) berobat ke luar negeri. Upaya ini sekaligus sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan rujukan di Indonesia.

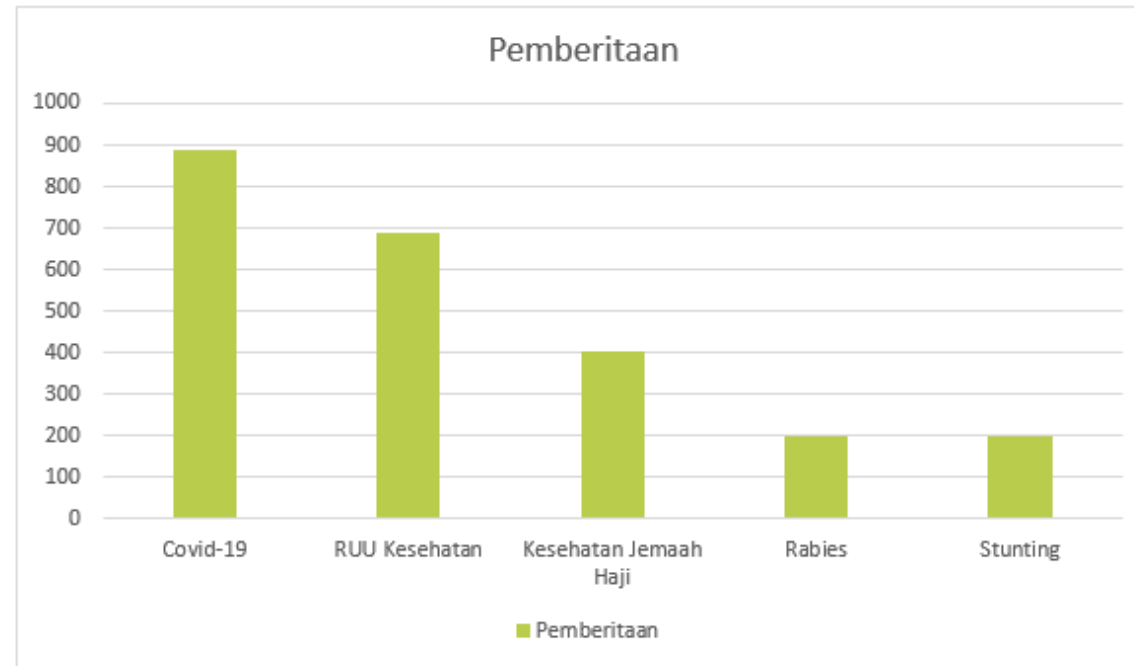
Obesitas

Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Nadia Siti Tarmizi mengatakan akan memberikan dukungan penuh dalam pengobatan kepada pasien obesitas Muhammad Fajri (26) yang mempunyai berat badan 300 kilogram. Hal ini dilakukan agar pasien dapat kembali beraktivitas kembali. Lebih lanjut, Nadia mengatakan Kemenkes RI akan memfasilitasi pasien MF agar dapat penanganan yang memadai. Meskipun, pasien MF sudah tidak melakukan perawatan di RSCM. Selain itu, Nadia akan bekoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Tangerang untuk ikut mensupport pasien MF.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu RUU Kesehatan. Salah satunya menyoroti RUU Kesehatan dibahas dengan landasan urgensi penguatan sistem kesehatan yang rencananya akan diwujudkan melalui transformasi kesehatan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat, Pusjak Upaya Kesehatan.

TREN PEMBERITAAN 21 - 27 JUNI 2023



COVID-19

- Presiden Joko Widodo kemarin, resmi mengumumkan pencabutan 'status pandemi' COVID-19 di Indonesia. Ia menyebut, kini Indonesia mulai masuk fase endemi. Adapun keputusan ini diambil lantaran mempertimbangkan angka kasus konfirmasi COVID-19 mendekati nihil. Selain itu, hasil sero survei menunjukkan 99 persen warga Indonesia sudah memiliki kekebalan COVID-19. Keputusan pencabutan ini juga didasari WHO yang telah mencabut status darurat COVID-19. Dirut BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan pembayaran untuk perawatan dan pengobatan pasien COVID-19 akan ditanggung BPJS Kesehatan usai penetapan 'endemi' COVID-19.
- Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Pencabutan itu ditetapkan setelah Indonesia berjuang menghadapi pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir. Jubir Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak terlalu senang. Sebab, meski Indonesia telah beralih dari status pandemi ke endemi, nyatanya COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Wiku meminta agar masyarakat tetap menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah RI.

RUU Kesehatan

Salah satu polemik RUU Kesehatan adalah dihapuskan *mandatory spending* atau anggaran wajib untuk kesehatan dari APBN dan APBD. Bahkan, di DPR, sebelum pengambilan keputusan, terjadi perdebatan alot antara fraksi soal ketentuan *mandatory spending* yang berujung pada voting. Mayoritas fraksi memilih pengaturan *mandatory spending* tidak diatur dalam RUU Kesehatan sehingga penganggaran kesehatan ke depannya berbasis program. Merespons hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan Fraksi PAN sejak awal menginginkan agar *mandatory spending* sebesar 10 persen dari total APBN. Saleh menjelaskan pada saat pembahasan pemerintah tidak menyetujui untuk dituliskan. Tetapi, mereka (pemerintah) akan memperjuangkan agar angka itu bisa dipenuhi setiap pembahasan APBN. Pemerintah menginginkan agar anggaran kesehatan dari APBN dan APBD tidak dikunci dan dibatasi. Hal tersebut akan membuat anggaran kesehatan lebih fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan program dan situasi kesehatan di masyarakat.

Kesehatan Jemaah Haji

Anggota Timwas Haji DPR Darul Siska mengatakan, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah sangat memperhatikan. Pasalnya, klinik tersebut kekurangan Dokter dan tempat tidur, sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap Jemaah Haji Indonesia tidak maksimal. Apalagi Jemaah Haji tahun ini Lansianya banyak, tentu ini menjadi catatan bersama Timwas Haji agar kedepan ada perbaikan di bidang kesehatan dimasa yang akan datang. Darul menyatakan dimasa yang akan datang, jika makin banyak Jemaah Haji Lansia, maka makin dibutuhkan banyak tenaga dokter yang memadai. Rasio dokter harus sesuai dengan berbagai penyakit yang dialami oleh jemaah. Selain itu, Darul mengungkapkan klinik ini sesuai rekomendasi dari Komisi VIII DPR agar pemanfaatannya ditingkatkan supaya tidak mubazir. Karena aset ini disewa sepanjang tahun, tetapi penggunaannya hanya untuk musim haji saja. Darul juga mengatakan bahwa akan membicarakan dengan Menkes supaya ada *good will* dan *political will* dari pemerintah. Agar fasilitas ini ditingkatkan menjadi rumah sakit dan bisa dimanfaatkan oleh Jemaah umroh yang setiap tahunnya datang ke sini. Bahkan jika memungkinkan menjadi rumah sakit yang berkompeten untuk melayani berbagai macam penyakit.

Rabies

Penyakit Rabies yang dikenal juga dengan istilah anjing gila saat ini menunjukkan tren peningkatan di Bali. Penyakit ini disebabkan infeksi virus Rabies pada otak dan sistem saraf. Penyakit ini tergolong sangat berbahaya karena berpotensi besar menyebabkan kematian. Penularan penyakit rabies dapat ditularkan dari hewan terinfeksi ke manusia melalui gigitan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom, hewan utama penular rabies adalah anjing. Selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia adalah kelelawar, kucing, dan kera. Gejala rabies bisa sangat bervariasi, seperti demam, takut dengan sinar matahari, takut dengan air, lelah lemas dan hilang nafsu makan. Oleh sebab itu, jika terkena goresan atau gigitan anjing pastikan dibersihkan dengan baik dan pastikan untuk mendapatkan serum atau vaksin rabies tidak lebih dari 2 hari sejak digigit hewan.

Stunting

Kementerian Kesehatan membenarkan bahwa anggaran yang disediakan untuk membeli biskuit sebagai salah satu upaya mengatasi stunting di tiap daerah sudah dihentikan dan dialihkan penggunaannya. Menanggapi adanya temuan pemberian makanan bergizi di daerah kerap menyalahi aturan seperti memberikan produk kemasan susu kotak dan biskuit yang tinggi lemak dan gula, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan telah mengadakan evaluasi dan audiensi bersama para ahli. Hasilnya, Dante menceritakan bahwa keputusan pemberhentian anggaran dilakukan setelah para ahli satu suara menyoroti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak agar terhindar dari stunting tidak efektif bila diberikan biskuit atau susu saja.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu COVID-19. Salah satunya menyoroti pembayaran untuk perawatan dan pengobatan pasien COVID-19 akan ditanggung BPJS Kesehatan usai penetapan 'endemi' COVID-19. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review dalam Program JKN, Pusjak PDK.